

KEBIJAKAN AGRIBISNIS TERNAK SAPI POTONG DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PETERNAKAN

Agustinus Lomboan^{1*}, Femi Hadidjah Elly¹, Deasy Soeikromo², Meiske L. Rundengan¹, dan Zulkifli Poli¹

¹Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, 95115

²Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, 95115

*Korespondensi email: alomboan@unsrat.ac.id

Abstrak. Peternakan sapi potong dikembangkan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. Pembangunannya menjadi perhatian serius pemerintah disebabkan ternak sapi potong menghasilkan produk daging yang diharapkan dapat menunjang produksi dalam Negeri. Permasalahannya sejauhmana kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah berkaitan dengan agribisnis sapi potong di daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pengembangan sapi potong yang berorientasi agribisnis di Kabupaten Minahasa. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan pengamatan langsung di lapangan dan mereview data yang telah dipublikasi. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive sampling* yaitu Kecamatan Remboken yang merupakan salah satu wilayah basis ternak sapi potong. Responden ditentukan secara *simple random sampling* sebanyak 30 petani peternak sapi potong. Sumber data adalah data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternak sapi potong digembalakan di lahan pertanian dengan pakan dipenuhi dari limbah tanaman pangan. Pengembangan peternakan sapi dikembangkan dengan orientasi bisnis tetapi masih terbatas pada *onfarm*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan sapi potong layak dikembangkan tetapi kebijakan pemerintah berkaitan dengan agribisnis peternakan belum maksimal.

Kata kunci: potensi, prospek, agribisnis, sapi potong

Abstract. Beef cattle farming was developed by the community by utilizing local resources. The problem was the extent to which the policies launched by the government were related to beef cattle agribusiness. The purpose of this study was to determine the potential for agribusiness-oriented beef cattle development in Minahasa Regency. The research was conducted using survey methods and reviewing published data. The research location was determined by purposive sampling, namely Remboken District, which was one of the base areas for beef cattle. Respondents were determined by simple random sampling of 30 beef cattle farmers. Data sources were primary and secondary data. The data analysis method used was descriptive analysis. The results showed that beef cattle were grazed on agricultural land with feed filled with food crop waste. Beef cattle farming was developed with a business orientation but was still limited to *onfarm*. Based on the research results, it can be concluded that the beef cattle business was feasible to be developed, but government policies related to livestock agribusiness have not been maximized.

Keywords: potential, prospects, agribusiness, beef cattle

PENDAHULUAN

Pemerintah Sulawesi Utara dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dengan prioritas pertama dari 17 prioritas pembangunan daerah adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Program prioritas ini dapat dicapai melalui pembangunan bidang peternakan. Subsektor peternakan dapat diandalkan dalam menunjang pendapatan masyarakat petani peternak bahkan pendapatan asli daerah. Program pembangunan peternakan dituangkan dalam visi Dinas Pertanian Peternakan Sulawesi Utara yakni terwujudnya system pertanian yang terintegrasi dan ramah lingkungan berbasis mekanisasi dengan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani peternak. Visi tersebut dijabarkan melalui misi Dinas Pertanian Peternakan Sulawesi Utara, yaitu : (i) menciptakan

system pertanian terintegrasi dan ramah lingkungan; (ii) mewujudkan pemanfaatan alat mesin pertanian (mekanisasi pertanian) dalam pengelolaan usaha tani ternak; dan (iii) meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan peternakan melalui usaha ekonomi produktif (Dinas Pertanian Peternakan, Sulawesi Utara, 2021).

Komoditas yang menjadi andalan pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara adalah ternak sapi potong. Peternakan sapi potong memiliki potensi secara ekonomi sehingga menjadi salah satu primadona untuk dikembangkan (Elly *et al* 2018 dan Elly *et al*, 2019). Peternakan sapi potong dikembangkan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. Pembangunannya menjadi perhatian serius pemerintah disebabkan ternak sapi potong menghasilkan produk daging yang diharapkan dapat menunjang produksi dalam Negeri. Kebijakan pembangunan peternakan sapi potong intinya bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan melalui penyediaan protein hewani asal ternak .

Permasalahannya sejauhmana kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah berkaitan dengan agribisnis sapi potong di daerah. Peternakan sapi potong masih dikembangkan secara parsial sehingga belum terintegrasi dari hulu ke hilir. Pengembangan agribisnis peternakan memiliki potensi dilihat dari sumberdaya yang tersedia, baik sumberdaya alamnya maupun sumberdaya ternak. Tetapi, sumberdaya lokal yang dikelola dalam menunjang produktivitas ternak sapi potong belum maksimal. Peternakan sapi potong dikembangkan dengan skala kecil, sehingga belum dikembangkan dengan orientasi bisnis. Peternakan sapi potong skala besar sudah dikembangkan oleh negara lain sebagai usaha industri seperti Australia, New Zealand, Brasil, dan Eropa (Rosiana dan Feryanto, 2014). Kajian berdasarkan potensi pemanfaatan sumberdaya lokal sangat dibutuhkan dalam akselerasi peningkatan produktivitas peternakan sapi potong. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut maka telah dilakukan penelitian di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pengembangan sapi potong yang berorientasi agribisnis di Kabupaten Minahasa.

MATERI DAN METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan pengamatan langsung di lapangan dan mereview data yang telah dipublikasi. Sumber data adalah data primer dan sekunder. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive sampling* yaitu Kecamatan Remboken yang merupakan salah satu wilayah basis ternak sapi potong. Responden ditentukan secara *simple random sampling* sebanyak 30 petani peternak sapi potong. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis RC ratio.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Minahasa adalah salah satu kabupaten yang memberikan kontribusi terhadap populasi ternak sapi potong tertinggi dibanding 14 kabupaten kota lainnya di Sulawesi Utara. Populasi ternak sapi di Kabupaten Minahasa tahun 2019 berjumlah 25908 ekor (18,61 persen) meningkat menjadi 26.167 ekor pada tahun 2020 (20,34 persen) dari total populasi ternak sapi potong di Sulawesi Utara) (BPS Sulawesi Utara, 2021). Peningkatan populasi ternak sapi potong di wilayah ini cukup memberikan

kontribusi bagi kebutuhan daging sapi secara Nasional (Rusdiana dan Praharani, 2018., Sodiq *et al*, 2018 dan Rusdiana, 2019). Sejauh ini, kebijakan pemerintah berkaitan dengan swasembada daging sapi belum bisa dicapai.

Berbagai faktor yang menyebabkan belum tercapainya program pemerintah tersebut. Faktor populasi ternak sapi potong diharapkan perlu dipacu untuk mendorong peningkatan produksi daging sapi. Kebijakan pemerintah dan realisasinya sangat dibutuhkan untuk akselerasi populasi ternak sapi potong. Kondisi peternakan sapi potong saat ini di wilayah penelitian masih dikategorikan peternakan rakyat dan diusahakan secara sambilan, hal ini seperti di daerah lain (Purnomo *et al*. 2017). Ciri-cirinya dilihat dari skala usaha relatif kecil, sebagai usaha rumahtangga, menggunakan teknologi sederhana, belum memperhatikan pengontrolan terhadap penyakit, belum padat modal (masih bersifat padat karya) dan belum berorientasi bisnis serta belum terintegrasi dengan usahatani lainnya dan belum berkelanjutan.

Pengelolaan peternakan rakyat sebagai contoh kasus dapat dilihat dari hasil penelitian di Kecamatan Remboken dengan populasi ternak sapi berkisar 2-11 ekor. Pemilikan ternak terbanyak adalah 4 ekor (dimiliki oleh 40 % petani peternak sebagai responden). Kecamatan Remboken adalah sebagai daerah basis ternak sapi di Kabupaten Minahasa dari 25 kecamatan. Populasi sebanyak 3,55 persen dari total populasi di Kabupaten Minahasa. Petani peternak mengembangkan ternak sapi potong sebagai sumber pendapatan mereka, walaupun masih secara tradisional. Rata-rata penerimaan, biaya produksi dan keuntungan serta RC ratio disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rata-rata penerimaan dan keuntungan usaha ternak sapi di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa

No.	Uraian	Nilai (Rp/Tahun)	Rata-Rata/ Peternak (Rp/Tahun)	Rata-rata/Ekor (Rp/Tahun)
1.	Penjualan Sapi	262.500.000,00	8.750.000,00	7.954.545,00
2.	Biaya Pakan	120.632.500,00	4.021.083,00	3.655.530,00
	Biaya Tenaga Kerja	90.489.583,00	3.016.319,00	2.742.109,00
		211.122.083,00	7.037.403,00	
3.	Keuntungan	51.377.917,00	1.712.597,00	1.556.907,00
4.	RC	1,24		
5.	Profit/C	0,31		

Penerimaan diperoleh dari penjualan ternak sapi selama setahun. Petani peternak menjual sapi sekitar 1-2 ekor setahun dengan harga bervariasi. Penerimaan dianalisis berdasarkan total penjualan sapi, rata-rata penerimaan per peternak Rp 8.750.000/tahun dan rata-rata per ekor ternak sapi (Rp 7.954.545/tahun) (Tabel 1). Keuntungan diperoleh dari selisih antara penerimaan dan biaya produksi. Biaya produksi dalam penelitian ini hanya dihitung berdasarkan biaya pakan dan biaya tenaga kerja (Tabel 1). Ternak sapi digembalakan di lahan-lahan pertanian artinya tidak menggunakan kandang. Biaya tetap dalam penelitian ini hanya untuk tali yang digunakan mengikat ternak sapi sehingga dianggap tidak mempengaruhi keuntungan.

Pakan yang dikonsumsi berupa rumput yang tumbuh liar dan limbah jagung. Jumlah rumput dan limbah jagung berkisar 5-15 kg per hari, diperoleh dari lahan pertanian baik milik sendiri maupun milik

petani lain. Rumput dan limbah jagung tidak dibeli, tetapi dalam penelitian dihitung sebagai biaya dan harga per kg dikonversi dari harga yang berlaku di lokasi penelitian. Biaya produksi dianalisis berdasarkan biaya pakan total, biaya pakan rata-rata yang dikeluarkan per peternak (Rp 4.021.083/tahun) dan biaya pakan rata-rata per ekor (Rp 3.655.530/tahun) (Tabel 1).

Tenaga kerja adalah tenaga kerja keluarga yang dialokasikan untuk memindahkan sapi, memandikan dan memberikan makan. Kegiatan ini dilakukan pada saat petani peternak tidak melakukan proses produksi usahatani lainnya. Jam kerja yang dialokasikan sekitar 0,42 – 0,83 jam per hari. Biaya dianalisis berdasarkan jam kerja dikalikan dengan upah yang berlaku di lokasi penelitian. Biaya tenaga kerja dalam penelitian dirinci berdasarkan biaya tenaga kerja total, biaya tenaga kerja rata-rata per peternak (Rp 3.016.319/tahun) dan biaya tenaga kerja rata-rata per ekor (Rp 2.742.109/tahun) (Tabel 1).

Keuntungan yang dianalisis berdasarkan keuntungan total, keuntungan rata-rata per peternak (Rp 1.712.597/tahun) dan keuntungan rata-rata per ekor (Rp 1.556.907/tahun) (Tabel 1). Keuntungan yang diperoleh dianggap kecil dalam setahun, sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah agar supaya penerimaan dapat ditingkatkan. Petani peternak mengembangkan ternak sapi dari tahun ke tahun mengingat ternak sapi mudah untuk dijual. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ternak sapi potong memiliki potensi pasar yang terbuka (Elly et al. 2019; Rudiana dan Talib, 2019). Hasil analisis RC ratio lebih besar dari satu, kondisi ini dapat dinyatakan bahwa usaha ternak sapi potong layak dijalankan. Penggunaan sumberdaya oleh petani peternak belum optimal sehingga keuntungan yang diperoleh belum maksimal.

Sistem usaha peternakan sapi potong baik di wilayah penelitian maupun wilayah lainnya pada dasarnya sama. Peternakan sapi potong berkembang dengan pola skala kecil dan dikembangkan sebagai usaha sampingan, penjualan dilakukan saat petani membutuhkan dana untuk kebutuhan anggota keluarga (Rosiana dan Feryanto. 2014). Pengembangan peternakan sapi potong melalui peningkatan populasi sulit berkembang mengingat adanya alih fungsi lahan di pedesaan (Mulyani *et al*, 2016).

Berbagai kebijakan dicanangkan pemerintah tetapi perlu direalisasikan secara maksimal. Kendala pakan perlu diminimalkan dengan cara memanfaatkan lahan-lahan tidur atau lahan yang tidak digunakan untuk usahatani. Lahan-lahan tersebut perlu dioptimalkan sehingga ketersediaan pakan meningkat. Pemanfaatan lahan diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan. Pasal 6 (1) Pemerintah daerah kabupaten/ kota wajib menetapkan suatu lahan sebagai tempat penggembalaan umum. Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) bahwa penetapan suatu lahan sebagai tempat penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan jika di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budidaya ternak skala kecil. Tempat penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai: a) penghasil tumbuhan pakan; b) tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan; c) tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau d) tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan (Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013).

Kabupaten Minahasa terdapat lahan ladang/huma seluas 12881 Ha dan lahan sementara tidak digunakan seluas 5382 Ha (BPS Sulawesi Utara, 2020). Lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh petani peternak untuk mengembangkan tanaman rumput yang berkualitas. Ladang/Huma adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang biasanya ditanami tanaman semusim dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi (berpindah-pindah). Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur. Lahan yang sementara tidak diusahakan adalah lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari satu tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 2 tahun) tidak diusahakan termasuk lahan sawah yang tidak diusahakan selama lebih dari dua tahun. Kebijakan pemanfaatan lahan sangat penting dan tidak bisa diabaikan dalam pengembangan peternakan sapi potong (Nur *et al.* 2018).

Alternatif lainnya adalah perlu introduksi teknologi untuk pengolahan pakan. Pengolahan pakan dilakukan pada saat terjadi over produksi tanaman hijauan atau limbah jagung segar untuk persiapan musim kemarau panjang. Beberapa penelitian yang dilakukan bahwa ternak sapi potong pada umumnya diintegrasikan dengan tanaman pangan (Susanti *et al.* 2014 dan Elly *et al.* 2019). Pelaksanaan introduksi teknologi membutuhkan intervensi pemerintah agar penerapannya dapat dicapai dengan maksimal. Pengolahan pakan membutuhkan alat seperti chooper untuk mencacah hijauan atau limbah jagung segar. Kebijakan ini diatur dalam peraturan pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan, yakni : alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi : a) perbibitan dan budidaya; b) penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan; dan c) panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan.

Realisasi kebijakan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dinyatakan bahwa perlu pemberdayaan petani peternak. Pemberdayaan peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan peternak. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak. Peraturan Pemerintah ini mengatur pemberian kemudahan dalam rangka pemberdayaan peternak untuk peternak yang jenis dan jumlah ternaknya di bawah skala usaha tertentu yang tidak memerlukan izin. Pemberian kemudahan kepada Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a) pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; b) pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik; c) penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi; d) pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha; e) penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan; f) pengutamakan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri; g) pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; h) pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau i) perlindungan harga dan Produk Hewan

dari luar negeri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013). Kebijakan agribisnis peternakan sapi potong dapat dicapai melalui optimalisasi potensi wilayah penelitian (Yulia *et al.* 2015). Optimalisasi sumberdaya lokal dengan tujuan memaksimalkan produktivitas sapi potong melalui realisasi berbagai kebijakan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan sapi potong memiliki potensi untuk dikembangkan dilihat dari peningkatan populasi ternak sapi potong dan kelayakan usaha (nilai RC ratio), tetapi kebijakan pemerintah berkaitan dengan agribisnis peternakan belum maksimal. Saran yang disampaikan, perlu intervensi pemerintah dalam mensosialisasikan dan menunjang realisasi beberapa kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dengan bantuan dana PNBPN skim RTUU.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Sulawesi Utara. 2020. Sulawesi Utara Dalam Angka. Badan Pusat Statistik, Manado.
- BPS Sulawesi Utara. 2021. Sulawesi Utara Dalam Angka. Badan Pusat Statistik, Manado.
- Dinas Pertanian Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. 2021. Laporan. Dinas Pertanian Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, Manado.
- Elly, F.H., A. Lomboan., Ch. L. Kaunang., M. Rundengan and Syarifuddin. 2019. Development Potential of Integrated Farming System (Local Cattle-Food Crops). *J. Animal Production*, 21 (3): 143-147.
- Elly, F.H., A.H.S. Salendu, Ch. L. Kaunang, Indriana, R. Pomolango, and Syarifuddin. 2018. Forage Introduction to Support Development of Cattle in Sangkub District. *International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB)*, 3 (5) : 1718-1720.
- Mulyani, A., D. Kuncoro, D. Nursyamsi, dan F. Agus. 2016. Analisis Konversi Lahan Sawah: Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi yang Mengkhawatirkan. *Jurnal Tanah dan Iklim*, 40 (2) : 121-133.
- Nur, TM., C. Fadli, dan H. Satriawan. 2018. Analisis Potensi Integrasi Kelapa Sawit Ternak Sapi di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. *Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 4 (2) : 69-80.
- Purnomo, S.H., E.T. Rahayu dan S.B. Antoro. 2017. Strategi Pengembangan Peternakan Sapi Potong Rakyat di Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. *Buletin Peternakan*, 41 (4): 484-494.
- Rosiana, N dan Feryanto. 2014. Evaluasi Kebijakan Swasembada Sapi Potong di Indonesia. Seminar Nasional PERHEPI, Tema : Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance, Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian. Prosiding PERHEPI, 209-227.
- Rusdiana, S. 2019. Fenomena Kebutuhan Pangan Asal Daging Dapat Dipenuhi Melalui Peningkatan Usaha Sapi Potong Di Petani. *Jurnal SOCA*, 13 (1): 61-83.
- Rusdiana, S dan C. Talib. 2019. Kebijakan Pemerintah Mendukung Peningkatan Usaha Sapi Potong di Peternak. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 13 (3) : 380–395.

- Rusdiana, S dan L. Praharani, 2018. Pengembangan Peternakan Rakyat Sapi Potong: Kebijakan Swasembada Daging Sapi dan Kelayakan Usaha Ternak. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 36 (2) : 97-116.
- Sodiq, A., P. Yuwono, Y. N. Wakhidati, A. H. Sidhi, M. Rayhan dan A. Maulianto. 2018. Pengembangan Peternakan Sapi Potong melalui Program Klaster: Deskripsi Program dan Kegiatan. *Jurnal Agripet*, 18 (2): 103-109.
- Susanti, Y., D. S. Priyarsono dan S. Mulatsih. 2014. Pengembangan Peternakan Sapi Potong untuk Peningkatan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah: Suatu Pendekatan Perencanaan Wilayah. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 2 (2) : 177-190.
- Yulia, L.M., Baga dan N. Tinaprilla. 2015. Peran dan Strategi Pengembangan Subsektor Peternakan Dalam Pembangunan Kabupaten Agam Sumatera Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 3 (2) : 159-176.